

Peran Government Resources Management System pada Siklus Akuntansi Keuangan Negara

(Studi Kasus Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Jawa Tengah)

Rifka Dwi Apriliani^{1*} dan Endang Kartini Panggiarti²⁺

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini meneliti penerapan aplikasi sistem *Government Resources Management System* di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Jawa Tengah. Berawal karena banyaknya kegiatan dan informasi yang harus secara cepat disampaikan, dilakukan pengambilan keputusan secara cepat, dan banyaknya daerah yang sulit terjangkau serta membutuhkan perjalanan lama, maka sistem GRMS ini memberikan kemudahan bagi pegawai instansi pemerintahan dengan memanfaatkan fasilitas internet. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan mendapatkan data dari wawancara dengan pelaksana GRMS. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, banyak pegawai pemerintahan yang masih belum familiar terhadap aplikasi sistem GRMS ini dan masih perlu mendapatkan pelatihan aplikasi ini. Program ini berbasis sistem dengan menggunakan aplikasi *e-government* dan untuk mengimplementasikannya lebih mengutamakan online daripada offline. Aplikasi yang dibutuhkan dalam GRMS diantaranya yaitu *e-project*, *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-controlling*, *e-delivery*, dan *e-performance*.

Kata Kunci: GRMS, aplikasi, informasi, pemerintah, online

1. Pendahuluan

Salah satu indikator pemerintahan yang baik adalah memiliki *good governance* yang baik, yaitu anti nepotisme, anti korupsi, anti kolusi, mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi. Beberapa daerah memiliki sub daerah yang luas dan besar, kadangkala tidak terjangkau dan membutuhkan waktu lama untuk berkoordinasi dan menjalani aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, sangat perlu menerapkan kemudahan jaringan internet untuk memudahkan komunikasi antar berbagai daerah secara cepat dan transparan. Untuk memberikan kemudahan penyaluran informasi yang akan diberikan pusat kepada daerah, dan selanjutnya oleh daerah informasi tersebut diberikan kepada daerah yang terkecil, maka diperlukan *e-government* yang memberikan kemudahan fasilitas untuk meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat.

Penerapan *e-governance* menjadi sesuatu usaha yang lebih baik dilaksanakan. Dalam menyikapi hal tersebut, meskipun belum banyak pelayanan publik yang dapat sepenuhnya difasilitasi oleh *e-government* melalui sistem yang tersedia, namun faktanya sejauh ini banyak kegiatan pelayanan publik disediakan melalui elektronik [1]. Adapun manfaat yang dirasakan seperti; 1) memperbaiki pelayanan pemerintah; 2) menaikkan keterbukaan, pengawasan, dan akuntabilitas; 3) menekan secara signifikan total beban tata usaha, hubungan, dan interaksi; 4) memperbaiki kemungkinan bagi pemerintah guna memperoleh sumber pendapatan yang aktual; 5) membuat suatu kondisi komunitas baru yang cepat dan tepat menjawab permasalahan; 6) memanfaatkan rakyat serta kelompok yang berbeda menjadi partner pemerintah ketika berlangsungnya penentuan dan penetapan macam-macam aturan publik [1].

Kemajuan dari perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat dalam pelaksanaan pemerintahan. Sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2003 yang mengatur mengenai sasaran dari pembangunan *e-government* di Indonesia yang bertujuan untuk membangun pelaksanaan pemerintahan dengan melalui media elektronik guna mengembangkan mutu pelayanan kepada orang umum dengan efektif serta efisien. Dengan dikembangkannya *e-government* diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintah. [13]

*E-mail: rifkaapriliani14@gmail.com

+E-mail: endangkartini2504@gmail.com

Dengan kemajuan teknologi yang telah tersedia, cara pemanfaatan dan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola pun sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemerintahan. Hasil yang diperoleh sangat bergantung pada cara sumber daya manusia (SDM) nya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya teknologi yang semakin maju, akan tetapi sumber daya manusia (SDM) sebagai pihak yang mengolahnya kurang optimal serta memumpuni, maka akan berakibat pada kurang maksimalnya hasil yang ingin dicapai dalam pemerintahan [14].

Menurut Sedarmayanti (2012 : 10) terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik menjadi syarat untuk pemerintahan dalam melaksanakan suara rakyat serta tercapainya sasaran dan cita-cita negara Indonesia [15]. Dalam mencapai tata kelola pemerintah yang baik salah satunya yaitu pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat. Hal ini perlu dimaksimalkan guna menciptakan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

Berbagai kemudahan seperti kecepatan pelayanan, transparansi, dan peningkatan kinerja birokrasi telah dapat diraih melalui *Government Resources Management System* selanjutnya disingkat GRMS. Penerapan GRMS tersebut memiliki dasar pemikiran, korupsi telah menggurita dalam berbagai bentuk dan melibatkan banyak pihak dan telah menggerogoti keuangan negara. Untuk itu, perlu adanya penyikapan, salah satunya dengan penataan pemerintahan yang baik atau *good governance* [12].

Government Resources Management System memiliki beberapa tujuan diantaranya : 1) menaikkan keterbukaan serta pertanggungjawaban ketika penyediaan barang serta jasa pemerintah; 2) mempermudah data mengenai kejadian maupun situasi tentang perubahan kelangsungan wujud kegiatan serta kesulitannya; 3) mempermudah dalam melihat perkiraan beban yang harus dikeluarkan guna membiayai tiap aktivitas dalam setiap prosesnya berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan. *Government Resources Management System* dapat menjawab keharusan guna senantiasa menyediakan pelayanan terbaik serta membantu masyarakat dengan efektif, efisien, sederhana, hemat biaya, terbuka serta pertanggungjawaban yang maksimum [12].

Untuk memperdalam kajian tentang GRMS ini, peneliti melakukan studi kasus pada Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang di Bagian Keuangan. Pada bagian ini terdapat dua bagian bendahara yaitu bendahara penerimaan serta bendahara pengeluaran. Pada bendahara pengeluaran memiliki bendahara pengeluaran pembantu yang memiliki fungsi untuk membantu bendahara pengeluaran di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang. Bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas pokok yaitu mengajukan anggaran selama satu tahun dan membelanjakan anggaran tersebut setiap bulannya. Pedoman untuk membelanjakan anggaran yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Kegiatan pembelanjaan diantaranya untuk kebutuhan kesekretariat, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Magelang 1 & 2, Rehab Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Magelang 1 & 2 dengan menggunakan uang persediaan, ganti uang, dan tambah uang.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas implementasi aplikasi GRMS di Kota Magelang, apakah penggunaan aplikasi GRMS ini telah sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengatur siklus akuntansi keuangan Negara, kendala yang muncul dalam pelaksanaan penerapan aplikasi ini serta solusi yang dilaksanakan guna menghadapi kendala tersebut. Oleh karena itu riset ini berjudul **PERAN GOVERNMENT RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM (GRMS) pada Siklus Akuntansi Keuangan Negara (Studi Kasus Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang)**.

2. Metode Penelitian

2.1. Sumber dan Jenis Penelitian

Jenis dari riset ini yaitu penelitian deskriptif yang memakai pendekatan kualitatif. Data yang dipergunakan yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden pada SKPD Balai Pengolahan Wilayah Jateng yaitu pengembang sistem (secretariat GRMS) dan pengguna sistem (aparatus pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui dokumen dan regulasi terkait.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara memperoleh data untuk riset ini yaitu :

- a. Wawancara adalah tata cara memperoleh data melalui tanya jawab dengan responden secara langsung, serta tidak menggunakan pedoman wawancara.
- b. Observasi adalah tata cara memperoleh data dengan melihat kondisi nyata, objek-objek yang terdapat di dalamnya baik manusia maupun barang yang ada.
- c. Dokumentasi, menjadi penyempurna saat penerapan metode observasi serta wawancara di dalam penelitian

kualitatif.

2.3. Analisis Data

Bentuk studi riset dalam penelitian ini yaitu bentuk analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang didapatkan melalui riset yang sudah dilaksanakan mengenai *Government Resources Management System* (GRMS). Berikut proses analisis data deskriptif kualitatif, yaitu :

- a. Menghimpun data serta informasi guna memperoleh perkiraan mengenai kegiatan penggunaan GRMS pada Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang dalam wawancara serta observasi kondisi yang sebenarnya.
- b. Menilai kesulitan yang muncul mengenai penggunaan GRMS.
- c. Membuat rancangan mengenai penerapan GRMS sesuai pertimbangan yang telah dilakukan mengenai hal yang dibutuhkan dengan menyesuaikan keadaan yang sebenarnya.
- d. Menyarankan penerapan sistem yang sesuai untuk dijalankan mengenai GRMS.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas GRMS

Government Resources Management System (GRMS) yang diterapkan oleh Provinsi Jawa Tengah yaitu suatu aplikasi yang tertata di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam aplikasi GRMS memuat diantaranya; *system e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-monev* serta *gph*, selain itu terdapat *networking* yang memuat; *system cloud server, video/audio streaming, DNSX filter, voip gateway server, nms, ap controller, the dude* serta pengelolaan pencatatan barang juga lekas dilaksanakan pada Provinsi Jawa Tengah. Inti yang terdapat pada sistem ini yaitu keterkaitan antar data yang dimuat dalam pengelolaan bisnis internal birokrasi, yang menjadi metode pelaksanaan keuangan pemerintah yang menjadi penunjang dalam memberikan service kepada orang umum serta pengembangan yang menjadikan terbentuknya pengawasan serta penilaian kemampuan birokrasi dalam kondisi yang ada di lapangan. Dimana yang menjadi latar belakang yaitu terdapat permasalahan dalam menyalurkan serta mendapatkan data anggaran ataupun realisasi dalam waktu yang singkat, hal tersebut menjadi alasan bahwa prosedur transparansi anggaran adalah hal yang diutamakan. Dengan SK Gubernur No 489 tahun 2014, tercipta *Government Resources Management System* yang telah diterapkan lebih dahulu oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah sanggup menyaksikan jalannya realisasi keuangan serta kemampuan tiap SKPD secara *real-time* melalui *system on-line* [12].

Indrajit menjelaskan bahwa pemicu utama tumbuhnya *e-government* dapat dilihat dari sejarah perkembangan global, diantaranya: 1) Perkembangan zaman yang hadir jauh cepat dari perkiraan mengakibatkan banyak rumor sejenis pendemokrasian, HAM, ketentuan, keterbukaan, penggelapan dana, masyarakat madani, tata kelola perusahaan yang baik, perniagaan secara bebas, pasar bebas, pasar terbuka, serta yang lainnya perlu mendapat perhatian; 2) Perkembangan teknologi informasi (komputer serta alat komunikasi) berkembang dengan sangat cepat di mana data, berita, serta ilmu bisa dibuat dalam waktu yang singkat serta dibagikan kepada masyarakat secara luas; 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat karena membaiknya kinerja industry swasta. Selain itu isu utama pada era ini adalah inovasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan public [2]. Sururi menyatakan bahwa dasar serta cara yang paling penting bagi perubahan pada pemerintahan meliputi : 1) menyatukan layanan; 2) memberikan hak kepada daerah untuk mengelola pelayanan; 3) mengambil keuntungan melalui kemitraan; 4) mengimplikasikan masyarakat; serta 5) memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun digitalisasi pemerintahan dilakukan melalui pengembangan jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (*e-government*) dan meningkatnya kemampuan ASN dalam penggunaannya [3].

GRMS yaitu tatanan sistem rekayasa terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana merupakan perwujudan dari *e-Government* di Jawa Tengah. Inti yang terdapat pada sistem ini yaitu keterkaitan antar data yang dimuat dalam pengelolaan bisnis internal birokrasi, yang menjadi metode pelaksanaan keuangan pemerintah yang menjadi penunjang dalam memberikan service kepada orang umum serta pengembangan yang menjadikan terbentuknya pengawasan serta penilaian kemampuan birokrasi dalam kondisi yang ada di lapangan. GRMS berupaya memerangi korupsi dalam berbagai bentuk dengan melibatkan banyak pihak [12]. *Government Resources Management System* (GRMS) [12], di mana sistem rekaya memuat diantaranya :

- *e-Budgeting* yaitu sistem penyusunan anggaran yang memuat aplikasi program computer melalui web guna memberikan kemudahan dalam prosedur penyusunan anggaran belanja daerah.

- *e-Project* planning yaitu sistem informasi yang mempunyai kegunaan dalam memberikan kemudahan jalannya penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam anggaran dimana aktivitas tersebut telah disetujui.
- *e-Procurement* yaitu sistem lelang suatu kegiatan yang dilaksanakan di media internet. p
- *e-Delivery* yaitu suatu fasilitas penyokong administrasi proyek yang memuat program computer dengan menggunakan web guna memberikan kemudahan dalam penyusunan perjanjian pengadaan perlengkapan/jasa serta penyediaan arsip secara keseluruhan.
- *e-Controlling* yaitu suatu unsur dari skema keseluruhan e-Government menggunakan konsep GRMS (*Government Resources Management System*). Sistem ini menjadi penghubung antara rencana pengerjaan kegiatan pekerjaan dalam *e-Project Planning* dengan output kegiatan yang kemudian dimasukkan pada sistem *e-Delivery*.
- *e-Performance* yaitu sistem informasi tata kelola prestasi yang digunakan untuk menilai kemampuan dari pekerja yang meningkat baik dari segi objektivitas, terstruktur, akuntabel, partisipatif, serta transparan dengan begitu tercapailah pengarahan pekerja yang didasarkan atas kemampuan kerja serta sistem karir kerja ASN pada lingkup Pemerintahan.

Government Resources Management System atau GRMS yaitu suatu metode layanan dengan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan yang lengkap yang memuat berbagai informasi dan layanan aduan, seperti program badan atau dinas, sampai pada jumlah anggarannya. GRMS merupakan sebuah sistem aplikasi yang dianggap mampu memonitor secara update seluruh perangkat Pemerintah Provinsi yang menerapkannya. Tidak hanya para pejabat dan perangkat daerah, masyarakat juga bisa melakukan pengawasan secara langsung melalui sistem ini. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, meningkatkan pengawasan, dan meminimalisasi korupsi.

Pada saat ini aplikasi GRMS sudah dianggap membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem aplikasi yang mampu dimonitor dan mampu menerapkan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan secara lengkap merupakan sistem yang sangat dibutuhkan pemerintah saat ini. Semua perangkat daerah mampu mengimplementasikan aplikasi ini, sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan efisien dan efektif.

3.2 Kendala Penerapan Aplikasi GRMS

Setiap penerapan suatu aplikasi pasti mengalami kendala. Namun kendala tersebut suatu hal yang positif agar kita bisa memperbaiki kekurangannya. Kendala dalam penerapan aplikasi GRMS yaitu proses migrasi dari offline menjadi online, baik dari aspek kesiapan sistem dan perangkat, kesiapan SDM, dan kesiapan data. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terpilih serta terlatih dalam mengoperasikan, merawat, serta membangun aplikasi yang berbasis teknologi informasi. Pada tahap awal implementasi GRMS ini hal yang paling nampak adalah adanya kecenderungan sikap resistensi dari aparat perangkat daerah. Pada awal penggunaan GRMS, terutama dalam proses penganggaran aparat perangkat daerah merasa kesulitan dan keberatan, karena sistem dianggap belum siap. Selain itu, masih banyak ketidaksesuaian dengan sistem penganggaran yang konvensional, yang berakibat tersendatnya proses penganggaran. Hal ini juga terjadi karena pengaruh perubahan pola kinerja berbasis manual menjadi berbasis elektronik yang memerlukan banyak penyesuaian. Masih banyak aparatur yang belum siap dengan penggunaan sistem digital karena ketidakmampuan teknis. Selain itu, hambatan non teknis seperti mindset pegawai, adanya kepentingan tertentu yang terganggu, serta kebiasaan kerja menghambat proses migrasi ini. Sistem yang semakin transparan, control yang ketat dan *real time*, serta perubahan pola kerja harus dilakukan oleh aparat pemerintah. GRMS juga meminimalisir ruang gerak terjadinya korupsi di birokrasi dari berbagai lini, baik manajerial internal maupun hubungan dengan pihak eksternal.

Kekurangan dari aplikasi GRMS terutama terkait dengan intergrasi antar sistem di dalam aplikasi GRMS. Dalam GRMS terdapat perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, pengadaan barang dan jasa, serta beberapa sistem lainnya belum bekerja dengan terus-menerus serta saling terintegrasi. Antar sistem di dalam aplikasi GRMS tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling terintegrasi. Hal ini mengindikasikan, bangunan sistem GRMS yang dijalankan belum terintegrasi, namun hanya kompilasi beberapa aplikasi menjadi satu ruang.

Dalam *Government Resources Management System* terdapat resiko kejahatan dalam dunia maya dunia maya atau disebut dengan *cyber crime* serta alat mengenai ketentuan untuk ICT yang belum berkapasitas. Kejadian permasalahan dimana behubungan dengan pengoperasian GRMS dijalankan secara *ad-hoc* oleh Bagian Bina Program, Kejadian permasalahan langsung diurus bagian admin, serta berita acaranya belum dicatat dengan berkala. Masih kurangnya pengelompokan serta pemilihan hal yang utama menjadi faktor kurang maksimalnya penyelesaian permasalahan tersebut.

3.3 Solusi yang Dilakukan

Hal yang dapat dilaksanakan dalam menyelesaikan kendala pada pelaksanaan program *Government Resources Management System* maka dapat dilakukan beberapa hal untuk meningkatkan program GRMS diantaranya :

1. Pemerintah Provinsi dapat mengadakan suatu pelatihan kepada para aparat sebagai sumber daya manusia mengenai aplikasi GRMS sebelum diterapkan. Meskipun pada akhirnya aparat akan terbiasa menjalankan GRMS, namun akan lebih baik jika dilakukan sosialisasi ataupun pelatihan GRMS sehingga dapat meminimalisir kendala yang dihadapi, dan aparat dapat mengoperasikan GRMS secara terintegrasi.
2. Penguatan upaya reformasi budaya kerja serta sistem insentif dan disinsentif bagi ASN dan perangkat daerah.
3. Dilaksanakan pemberian pemahaman tentang harapan Pemerintah Provinsi guna mengembangkan *Government Resources Management System* oleh masyarakat yang mesti ditingkatkan. Masalah ini dilaksanakan sebab masyarakat harus terkait dengan kegiatan karena hal tersebut juga akan dinikmati oleh masyarakat.
4. Para pemangku kepentingan dari dalam wajib memberikan support terhadap pelaksanaan program *Government Resources Management System* agar pelaksanaannya semakin efektif.
5. Keterbukaan baik informasi maupun data mengenai semua program *Government Resources Management System* oleh masyarakat sehingga transparansi terjamin wajib diperhatikan untuk tercapainya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
6. Pemerintah akan lebih baik jika memperhatikan bantuan materiil ataupun imateriil yang disuguhkan dengan pihak luar. Dimana bantuan tersebut berpengaruh pada penurunan pengeluaran APBD pada bagian ini serta akan berpengaruh positif dengan efektivitas pelaksanaan program *Government Resources Management System* (GRMS).
7. Pemerintah dapat mengevaluasi kembali sistem yang termuat *Government Resources Management System* (GRMS) sehingga dapat diperbaiki sistem tersebut, paling tidak tergolong antarsistem mengenai fungsi dan kegunaan agar dapat terintegrasi, serta kelengkapan dari fitur yang tersedia yang dapat memudahkan penggunaannya.
8. Mengungkapkan visi serta misi *Government Resources Management System* pada pelaksanaan program yang mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.
9. Membentuk rancangan dengan terperinci serta secara lengkap sehingga mudah untuk dipahami.
10. Melaksanakan diskusi serta musyawarah terhadap pemangku kepentingan sehingga diperoleh titik temu yang meminimalisir ketidaksepakatan kepentingan pada pelaksanaan program *Government Resources Management System*.
11. Pemerintah melakukan evaluasi sistem pengolahan terkait fasilitas yang tersedia dalam fitur yang disesuaikan dengan kegunaan dan kemudahan yang diperoleh. Salah satunya dengan melakukan update dan pengembangan dalam fitur aplikasi.
12. Mengembangkan tata kelola database yang lebih baik sehingga dapat dikembangkan melalui pelaksanaan rancangan pembangunan sistem database pada GRMS. Hal ini dapat memberikan keamanan pada penggunaan sistem, jika terjadi risiko kerusakan database.
13. Lebih memperketat keamanan akses aplikasi untuk menghindari kejahatan dunia maya (*cyber crime*).
14. Membuat Prosedur Operasional Standar (SOP) pada manajemen insiden mengenai GRMS.
15. Memperhatikan pengelolaan insiden GRMS dengan membuat skala prioritas dan standar khusus serta kebijakannya.

Efektivitas penerapan *Government Resources Management System* dapat dinilai dengan menggunakan teori penerapan *e-Government* yang dikemukakan Darcy pada Indrajit [2] yang meliputi :

1. Indikator *Political Environment* yaitu kondisi politik di saat program GRMS berada serta diterapkan. *Political Environment* memfokuskan dalam pemberian pengetahuan terhadap masyarakat, menempatkan pekerjaan ini menjadi suatu hal yang diutamakan, kedudukan pihak sponsor dalam, produk serta jasa yang dibuat wajib jelas serta terdapat kegunaan yang diperoleh pihak pengguna dari program *Government Resources Management System*.
2. Indeks *Leadership* yaitu tanggung jawab dari pihak manajer kegiatan guna menjalankan mulainya suatu pekerjaan hingga selesai sesuai dengan siklus proyek (*project life cycle*) yang dilaksanakan. Indikator *leadership* mempunyai cakupan kapasitas seorang manajer dalam mengoperasikan macam-macam dampak dari politik, kapasitas seorang manajer dalam mendistribusikan berbagai sumber daya yang diperlukan serta kemampuan seorang manajer dalam menjalankan beberapa dampak dari pemangku kepentingan.

3. Indeks *Planning* adalah rancangan secara luas serta terperinci mengenai rancangan eksistensi GRMS ini.
4. Indikator *Stakeholder* yaitu sejumlah golongan yang merasa mempunyai keperluan (langsung ataupun tidak langsung) mengenai penyelenggaraan *Government Resources Management System*.
5. Indikator *Transparency/Visibility* yang mencakup pemenuhan transparansi informasi maupun data serta langkah dalam pengelolaan informasi dengan media internet.
6. Indeks *Budgets* yaitu pelaksanaan program *Government Resources Management System* yang mencakup sejumlah anggaran yang didistribusikan guna program GRMS ini serta dukungan anggaran dari pihak luar untuk pembangunan program GRMS.
7. Indikator *Technology* yaitu penerapan GRMS mencakup teknologi yang dimanfaatkan, kesederhanaan penerapan teknologi serta partisipasi teknologi guna menaikkan kemungkinan suksesnya sebuah program.
8. Indikator *Innovation* yang meliputi inovasi dari penyelenggara program dalam mengelola GRMS ini serta kapasitas pekerja untuk membentuk pemikiran serta melaksanakannya pada implemmentasi program GRMS ini.

Program *Government Resources Management System* diharapkan dapat dilaksanakan serta dijalankan bersama support semua bagian yang terkait dengan begitu program bisa meningkat serta semua aktivitas pengeluaran yang dikeluarkan oleh semua pihak di pemerintahan semakin terukur serta bisa dikendalikan. Untuk berikutnya pengembangan serta pengukuhan sistem pelaksanaan keuangan ini akan berakibat maupun memberikan imbas substansial kepada perolehan serta membaiknya pelayanan kepada orang banyak.

4. Kesimpulan

Perkembangan zaman telah memberikan dampak yang cukup besar dalam segala bidang, salah satunya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak positif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah guna tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pemanfaatan teknologi yang baik serta di dukung dengan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku yang menjalankan teknologi tersebut, maka dapat memaksimalkan tugas dan tanggungjawab dari setiap pekerjaan yang dilakukan di bidang pemerintahan. Terwujudnya hasil yang maksimal dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai tersebut akan berdampak pada maksimalnya pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Pada studi ini bisa diperoleh sejumlah kesimpulan, Pertama, Program *Government Resources Management System* adalah program yang saat ini dibutuhkan oleh pemerintahan untuk membantu dalam rangka melakukan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan. Program ini berbasis sistem dengan menggunakan aplikasi *e-government* dan untuk mengimplemmentasikannya lebih mengutamakan online daripada offline. Semua aparat pemerintah sampai dengan perangkat desa harus mampu mengaplikasikan aplikasi ini untuk mempermudah dan mempercepat sistem informasi yang dibutuhkan. Aplikasi yang dibutuhkan dalam GRMS seperti *e-budgeting*, *e-project*, *e-procurement*, *e-delivery*, *e-controlling* dan *e-performance*.

Kedua, GRMS adalah rekayasa yang masih ditingkatkan oleh pemerintah. Saat ini Jateng telah menerapkan dan mengembangkan aplikasi GRMS tersebut. Ketidadaan persepsi dari responden tentang penilaian mereka terhadap implementasi aplikasi ini merupakan salah satu kelemahan penelitian ini. Penelitian ini hanya bersumber dari wawancara oleh dua responden yang menerapkan aplikasi GRMS ini di Balai Pengolahan Wilayah Jateng. Tidak banyak yang diungkapkan bagaimana penerapan aplikasi ini di Balai Pengolahan Wilayah Jateng, namun penerapan aplikasi ini mewakili seluruh pengguna aplikasi GRMS di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kekurangan tersebut diantaranya masih diperlukan pelatihan tentang aplikasi sistem GRMS, kualitas SDM yang sesuai dengan sistem ini, jaringan internet yang memadai, dan lain sebagainya.

Ketiga, untuk penelitian ke depan diharapkan ada penelitian yang menggali persepsi dari responden pengguna program GRMS ini tentang penilaian mereka terhadap aplikasi ini. Apakah aplikasi ini memang sepenuhnya menjadi harapan mereka dan pihak-pihak yang membutuhkan. Penggalan informasi dari responden sampai dengan perangkat desa yang menggunakan aplikasi ini, baik dari segi *e-budgeting*, *e-project*, *e-procurement*, *e-delivery*, *e-controlling* maupun *e-performance*.

5. Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis haturkan Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang luas biasa besarnya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Dengan ini saya mengucapkan terimakasih untuk :

- Ibu saya Arif Faizatun Aslamiyah, terimakasih doa yang selalu dipanjatkan dan ungkapan kasih sayang yang tidak terukur serta tidak pernah lelah untuk memberikan yang terbaik.
- Bapak saya, Saefodin, yang tak pernah putus untuk memberikan doa serta support dalam bentuk materiil ataupun non materiil yang luar biasa.
- Bapak Drs. Sumantoro, S.ST, MT., selaku Kepala BPJ Wilayah Magelang yang telah memberikan kesempatan saya untuk menggali pengetahuan mengenai GRMS di BPJ Wilayah Magelang.
- Bapak Agus Winarno yang telah memberikan materi mengenai GRMS secara langsung.
- Semoga Tuhan Yang Maha Esa, membalas jasa yang kalian berikan pada hari kemudian serta memberikan kemudahan dalam segala hal. AMIN.

Daftar Pustaka

- [1] Holle, Eric S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government : Upaya meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. From <https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal-paper/sasi/Jurnal%20SASI%20Vol%2017%20No%203%20Juli-September%202011/PELAYANAN%20PUBLIK%20%20MELALUI%20ELECTRONIC%20GOVERNMENT...%20E.%20Holle.pdf>
- [2] Indrajit, R. E (2009). Electronic Government; Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Jakarta: Aptikom. From https://www.academia.edu/14190703/E-Government_Konsep_Pelayanan_Publik_Berbasis_Internet_dan_Teknologi_Informasi
- [3] Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. Spirit Publik, 12(2), 14-31. From <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/download/16236/13050>
- [4] Usman, H., & Akbar, P. S. (2008). Metodologi Penelitian Sosial (Edisi ke-2). Jakarta: Bumi Aksara. From <https://www.tokopedia.com/tokobuku20/buku-metodologi-penelitian-sosial-edisi-2>
- [5] Sofianto, Arif. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital Di Provinsi Jawa Tengah. From https://www.researchgate.net/publication/336966453_Inovasi_Manajemen_Pemerintahan_Berbasis_Aplikasi_Digital_di_Provinsi_Jawa_Tengah
- [6] Fanida, Eva Hany., & Fitrotun Niswah. (2015). Government Resources Management System (GRMS) : Inovasi Layanan Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Surabaya. From <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1499>
- [7] Perdana, Dani Rizikiyan., & Eva Hany Fanida. (2013). Efektivitas Penerapan Government Resources Management System Di Kantor Pemerintah Kota Surabaya. From <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/3333/6017>
- [8] Cahyati, Yuliana & Hari Murti. (2018). Sistem E-Surat Pada Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah Berbasis Framework Codeigniter. From <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/5994/1861>
- [9] Noviana, Rina. Sulandari. Lituhayu. Manajemen e-Government Berbasis Web Model Government-to-Citizen (G2G) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. From <https://media.neliti.com/media/publications/135616-ID-manajemen-e-government-berbasis-web-mode.pdf>
- [10] Rizky, A. F. & Herdinyanti, Anisah. & Susanto, T. D. (2017). Pembuatan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Insiden pada Government Resources Management System Kota Surabaya Berdasarkan ITIL V3. From <http://is.its.ac.id/pubs/oajis/index.php/home/detail/1699/Pembuatan-Prosedur-Operasional-Standar-Pengelolaan-Insiden-pada-Government-Resources-Management-Systems-Kota-Surabaya-Berdasarkan-ITIL-V3>
- [11] Andhika, L.R (2017), Budaya Inovasi Aspek yang Terlupakan dalam Inovasi Kepegawaian, Civil Service Journal, 11(1), 49-61, Retrieved from <http://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/37>
- [12] Government Resources Management System (GRMS). Diakses Pada 1 Juni 2020. <https://grms.jatengprov.go.id/>
- [13] Setiawan, Herri dan Khabib Mustofa. 2013. Metode Audit Tata Kelola Teknologi Informasi di Instansi Pemerintah Indonesia. From <https://repository.ugm.ac.id/id/eprint/33143>
- [14] Sari, Mutia., Hasan Basri, Mirna Indriani. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya. From <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/8970>
- [15] Wijayanti, Lilis. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah. From <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/49380>